

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 10
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I
Kementerian Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 4 September 2023
Waktu : 10.50 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. RKA Kementerian Pertanian Tahun 2024; dan
2. Usulan program-program yang akan didanai oleh
DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
didampingi oleh Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi
IV DPR RI/F-PG) dan Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M.
(Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B (Kabag Set. Komisi IV
DPR RI)
Hadir : A. 31 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.
(Sekretaris Jenderal);
2. Dr. Jan Samuel Marinka, S.H., M.H.
(Inspektur Jenderal);
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman
Pangan);
4. Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T.
(Direktur Jenderal Perkebunan);
5. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal
Hortikultura);

6. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);
7. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);
8. Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian);
9. Prof. (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian); dan
10. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina Pertanian).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pertanian, membahas RKA Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dibuka pukul 10.50 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian atas Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, sebesar Rp14.658.088.222.000,00 (empat belas triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.489.170.267.000,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp124.571.496.000,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp3.006.582.939.000,00 (tiga triliun enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp1.009.560.889.000,00 (satu triliun sembilan miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp1.067.355.663.000,00 (satu triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp2.545.513.875.000,00 (dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp2.584.280.407.000,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
 - h. **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, sebesar Rp958.933.392.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp905.248.067.000,00 (sembilan ratus lima miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - j. **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp966.871.227.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian mengenai usulan Realokasi Eksternal lingkup Eselon I Kementerian Pertanian untuk Pemenuhan Kebutuhan Operasional Penyuluh dalam Penyediaan Paket Pulsa Selama 1 (Satu) Tahun TA 2024, dengan rincian sebagai berikut:
- a. **Sekretariat Jenderal**, mengalami realokasi sebesar Rp711.143.000,00 (tujuh ratus sebelas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, mengalami realokasi sebesar Rp333.968.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, mengalami realokasi sebesar Rp10.184.773.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, mengalami realokasi sebesar Rp3.343.453.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, mengalami realokasi sebesar Rp3.434.930.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, mengalami realokasi sebesar Rp6.747.077.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, mengalami realokasi sebesar Rp8.326.017.000,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh belas ribu rupiah);
 - h. **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, mengalami realokasi sebesar Rp917.242.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, mendapatkan tambahan anggaran yang berasal dari realokasi eksternal sebesar Rp34.486.200.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - j. **Badan Karantina Pertanian**, mengalami realokasi sebesar Rp487.597.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian mengenai Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp2.762.645.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DAK Fisik sebesar Rp2.462.600.000.000,00 (dua triliun empat ratus enam puluh dua miliar enam ratus juta rupiah); dan
 - b. DAK non Fisik sebesar Rp300.045.000.000,00 (tiga ratus miliar empat puluh lima juta rupiah).
 4. Komisi IV DPR RI menilai perlu ada alokasi anggaran khusus untuk pengembangan pertanian di wilayah perbatasan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun kegiatan pengembangan wilayah perbatasan sesuai kondisi dan potensi wilayah masing-masing dengan merealokasi anggaran dari kegiatan *Food Estate* atau sumber anggaran lainnya.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh mengenai pelaksanaan pengembangan *Food Estate* di seluruh lokasi yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar hasil kajian dan evaluasi diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi dan realokasi anggaran Dukungan Manajemen di setiap Eselon I Kementerian Pertanian TA 2024 karena dinilai terlalu besar.
8. Komisi IV DPR RI meminta setiap Eselon I teknis Kementerian Pertanian untuk bekerjasama dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam rangka mendukung penyediaan bibit dan benih berkualitas serta harus tercantum di dalam RKA Tahun 2024.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi seluruh anggaran dalam RKA Tahun 2024 sebelum diputuskan dalam Rapat Kerja.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi kerjasama dengan asuransi Jasindo atas Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi terkait sulitnya klaim.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151